

# LAMPIRAN

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015



**BUPATI SEMARANG**  
**KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG**  
NOMOR : 061/0113/2015  
TENTANG  
**RENCANA KINERJA TAHUN 2015**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai prioritas dan sasaran program pembangunan serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Semarang agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka perlu disusun Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Rencana Kinerja Tahun 2015 Kabupaten Semarang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 /M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD )Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1 );
35. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1 );
36. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Rencana Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk Pengukuran Pencapaian Kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan dan pelaksanaan evaluasi laporan.
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil perencanaan kinerja yang berupa proses penetapan kegiatan setiap tahun dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2015
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27 - 03 - 2015

**BUPATI SEMARANG,**

  
**MUNDJIRIN**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;  
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;  
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Semarang;  
3. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

---

Lampiran  
Keputusan Bupati Semarang  
Nomor : 061/0001113/2015  
Tanggal : 27 - 03 - 2015  
Tentang  
Rencana Kinerja Tahun 2015  
Pemerintah Kabupaten Semarang

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		
			• Prosentase pelayanan Jamkesmas	17,05	
			• Prosentase Pelayanan Jamkesda	4,78	
			• Prosentase Pelayanan Puskesmas kepada Maskin	30	
		Meningkatnya akses kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Rasio posyandu (per satuan balita)	22	
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu (per satuan penduduk)	0,38	
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0004	
			Rasio dokter (persatuan penduduk)	0,24	
			Rasio tenaga medis (persatuan penduduk)	0,31	
			Cakupan pelayanan puskesmas	136,84	
			Prosentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	100	
			Prosentase jumlah indicator kinerja SPM Pelayanan Kesehatan yang memenuhi target RPJMD	100	
			Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat	Rata rata Angka Harapan Hidup (pertahun)	72,5
				Rata Rata Angka Kematian Bayi (per Kh)	8
		Rata Rata Angka Kematian Ibu (per Kh)		102	
		Rata Rata Angka Kematian Balita (per Kh)		5	
		Cakupan Desa Siaga Aktif		100	
		Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih	Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	93,64	
			Persentase penduduk berakses air minum	89,36	
			Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum	73,25	
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	62,2	
			Persentase luas permukiman yang tertata	55,21	
		Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita serta anak sekolah dasar	Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100	
			Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	
		Terwujudnya norma keluarga kecil yang	Rasio Akseptor Keluarga Berencana (per Keluarga)		

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target
		berkualitas dan sejahtera	Rata rata jumlah anak (per keluarga)	3,1
			Prosentase Keluarga Sejahtera Kat. I	22
			Prosentase Keluarga Pra Sejahtera	20
		Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan di wilayah selatan	prosentase tahapan pendirian Rumah Sakit	80
2	Mewujudkan masyarakat cerdas, Kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan Ketaqwaan	Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan	Angka Partisipasi PAUD	40,92
			Angka Partisipasi Murni (APM)	
			• SD/MI	95,13
			• SMP/MTs	81,84
			• SMA/SMK/MA	40,1
			Angka Partisipasi Kasar (APK)	
			• SD/MI	104,98
			• SMP/MTs	96,04
			• SMA/SMK/MA	52,91
			Angka Putus Sekolah	
		• SD/MI	0,11	
		• SMP/MTs	0,21	
		• SMA/SMK/MA	0,7	
		Angka Melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs	92	
		• Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	69	
		• Angka Melek Huruf usia > 15 th	99,98	
		Meningkatnya jumlah dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal	Prosentase Ruang kelas sekolah dasar yang sesuai standar ketentuan	90
			Prosentase Ruang kelas Sekolah menengah yang sesuai standar ketentuan	90
			Prosentase Ruang kelas sekolah menengah atas dan Kejuruan yang sesuai standar ketentuan	41
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	
• SD/MI	0,8			
• SMP/MTs	0,31			
• SMA/SMK/MA	0,15			
Prosentase Angka Kelulusan				
- SD/MI	99,98			
- SMP/MTs	99,65			
- SMA/SMK/MA	99,05			
Tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang memenuhi kompetensi yang memiliki intellengence quotient ( <i>daya tangkap</i> ), emotional quotient ( <i>kecerdasan emosional</i> ), spiritual quotient ( <i>kecerdasan spiritual</i> )	Guru yang berpendidikan S1/D-IV			
	• TK/RA, SD/MI	61		
	• SMP/MTs	94		
	• SMA/MA/SMK	98		
	Prosentase Guru bersertifikat pendidik			
	- SD/MI	84		
- SMP/MTs	86			
- SMA/SMK/MA	89			
Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti diklat	6.901			
Tersedianya sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry	Prosentase kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis industri	100		
	Prosentase ketersediaan laboratorium industri pada persekolahan	100		



No	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target
		Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing	Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	70
		Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja	Jumlah industri Rumah Tangga	10.368
			Jumlah Industri Kecil Menengah	1.505
			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	102.534
		Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga social kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertunjukan kesenian	5
			Cakupan pembinaan organisasi kesenian	1200
			Jumlah Organisasi Kepemudaaan	18
			Jumlah Organisasi Olahraga	150
			Jumlah pencapaian prestasi olahraga tingkat provinsi	12
			Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat nasional	6
			Jumlah grup kesenian	1200
			Jumlah gedung kesenian	1
			Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	10
			Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	34	
3	Meningkatnya kegiatan Usaha Daerah Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Local	Terwujudnya sentra/klaster usaha skala umkm dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing	Jumlah UMKM yang aktif	26.771
			Jumlah sentra /klaster skala UMKM	8.302
		Terwujudnya kawasan industry yang menyerap tenaga kerja lokal	Jumlah Kawasan Industri (lokasi)	3
			Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	87,25
		Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran	Prosentase peningkatan produksi Petani	0,45
			Jumlah ketersediaan GAPOKTAN yang aktif	234
		Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian, menuju agrobisnis, agroindustri dan agro wisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sector pertanian	Prosentase peningkatan produksi padi palawija dan hortikultura	
			• Padi	205.658
			• Palawija	57.225
			• Holtikultura	57.500
			Kontribusi PDRB Pertanian	2.205.223,5
			Jumlah agrobisnis, agrowisata & agro industri	4
		Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industry local	Jumlah Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan	2
			Jumlah Pengembangan Produk Industri Local	52,5
Berkembangnya industry pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya local	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	10		
	Kontribusi PDRB Pariwisata	2.881.763		
	Jumlah promosi budaya	9		
Tumbuhkembangnya	Jumlah peningkatan	40		

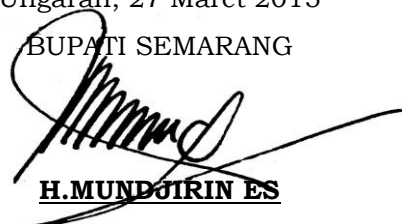
No	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target		
		kelompok usaha produktif badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab social perusahaan ( <i>corporate social responsibility</i> )	kelompok usaha petani melalui program CSR			
4	Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif efisien dan akuntabel	Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga redponsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan	Prosentase aparatur yang sesuai kompetensi jabatannya	100		
			Prosentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran PNS	100		
			Prosentase menurunnya kasus pelanggaran oleh PNS	0,004		
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah	Rata Rata skor evaluasi lakip SKPD 2014	CC		
			Terciptanya transparansi dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah media informasi pembangunan dan pemerintahan	4	
				Jumlah informasi pembangunan dan pemerintahan yang dimuat dalam media informasi	2500	
		Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	Prosentase SKPD yang menginformasikan pelaksanaan pembangunan	100		
			Prosentase SKPD yang mengakomodir penganggaran yang responsive gender	10,97		
					Prosentase penerapan system pengendalian intern pemerintah	100
					Opini BPK terhadap laporan Keuangan daerah	WTP
Prosentase SKPD yang menerapkan SPM	24,6					
Prosentase SKPD yang menerapkan standar pelayanan Publik	100					
Prosentase SKPD yang memperoleh skor baik penilaian IKM	100					
5	Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi	Tersedianya Dokumen Tata Ruang sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen penataan ruang	2		
			Meningkatnya pelayanan perijinan yang tertib, tepat waktu transparan dan akuntabel	Prosentase Jumlah ijin yang diterbitkan	100	
		Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum		Prosentase penerbitan perijinan yang tepat waktu	100	
			Tersedianya regulasi dan promosi yang	Prosentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100	
				Prosentase Penurunan pelanggaran ketertiban	0,102	
			Jumlah Kebijakan yang mendukung iklim usaha	2		

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target
		mendukung investasi	Jumlah promosi yang mendukung investasi	2
6	Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Tersedianya sarana prasarana transportasi yang berkualitas dan merata	Jumlah Angkutan umum yang layak jalan	2.951
			Prosentase pemenuhan sarana prasarana kelengkapan pelayanan terminal angkutan	100
			Prosentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas	100
			Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	75
			Prosentase Jembatan dalam kondisi baik	70
		Tersedianya jaringan irigasi dan sumber air untuk pertanian	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	65,61
			Prosentase lahan pertanian yang teraliri jaringan irigasi	100
		Tersedianya prasarana olahraga, ruang public dan ruang terbuka hijau diperkotaan	Prosentase penyediaan Luasan Ruang Terbuka Hijau untuk publik	55,81
			Jumlah sarana olahraga	19
		Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai	Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	93,64
			Jumlah instalasi PDAM	35.640
		Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi	Prosentase rumah tangga layak huni	82,54
			Prosentase rumah tangga bersanitasi	62,2
		Tersedianya saran dan prasarana pengelolaan sampah	Rasio ketersediaan tempat pembuangan sampah (Per 1.000 penduduk)	0.25
			Prosentase Penanganan sampah	79.55
		Terpenuhinya kebutuhan energi listrik	Prosentase Rumah tangga pengguna listrik	100
			Jumlah instalasi listrik PLN	253.380
		Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar	33
			Jumlah pasar modern yang memenuhi standar	95
		7	Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah
Jumlah kegiatan pembangunan swadaya oleh masyarakat	4			
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah social dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup	Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan			6,88
	Prosentase Partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah			5,44
	Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta			82,18
	Prosentase penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial			50
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah masyarakat dan swasta	Prosentase tenaga kerja dibawah umur			0,99
	Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak			0,03
Meningkatnya	Jumlah PKK aktif			8001

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target
		pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat	Jumlah Posyandu Aktif Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	1400 235
8	Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam	Jumlah penerapan tehnologi tepat guna dalam upaya pelestarian SDA	3
		Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah penerapan kerjasama pengelolaan SDA dan lingkungan	5
		Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan	Prosentase peningkatan jumlah DAS yang terlindungi	100
			Prosentase penurunan pertambahan tanpa ijin	100
			Cakupan pantauan pencemaran lingkungan (titik)	45
		Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat	Prosentase pengembangan hutan rakyat	1,4
		Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian	Rata rata Penyediaan pupuk per tahun	13.500
			Prosentase pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani	100
Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Desain Tata Ruang	Prosentase optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pembangunan ekonomi	45.870		

Ungaran, 27 Maret 2015

BUPATI SEMARANG



**H. MUNDJIRIN ES**